Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dianggap sebagai salah satu pasar tenaga kerja yang menjanjikan bagi dunia bisnis. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 15.434,2 T berdasarkan harga berlaku. UMKM merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, UMKM menyumbang sebesar 61,1% terhadap PDB Indonesia. Sektor UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sebesar 89%. Usaha mikro menyumbang 37,8% terhadap PDB. Berdasarkan data diatas, potensi UMKM Sangat mempengaruhi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam **UMKM** usahanya, para pelaku mengalami menjalankan permasalahan. Menurut Harrod-Domar (Wahid, 2014:14) permasalahan yang dhadapi oleh para pelaku UMKM diantaranya yaitu kesulitan modal (35,7%), kesulitan pemasaran (34,8%), transportasi (2,8%), upah buruh (0,8%), Keterampilan (1,2%), bahan bakar minyak/energi (4,1%), bahan baku (10,8%), dan lainnya (9,8%).

Permasalahan terbesar yang dialami oleh para pelaku UMKM yaitu kesulitan untuk mendapatkan permodalan di lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Sebagian besar UMKM tidak memiliki informasi operasional dan keuangan yang terorganisir dengan baik, hal ini menyebabkan lembaga keuangan sulit mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan dari UMKM tersebut. Selain itu, para pelaku UMKM juga tidak memenuhi pesyaratan utama perkreditan, yaitu agunan. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan ragu-ragu dalam memberikan bantuan kredit yang disalurkan dengan mempertimbangkan risiko default. Padahal kenyataanya, masih banyak UMKM yang layak (feasible) namun tidak dapat memenuhi persyaratan kelayakan kredit (bankable).

Pemerintah menciptakan skema pembiayaan kredit melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh modal usaha. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema Kredit/Pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha yang layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai persyaratan perbankan (bankable). Selain itu, Pemerintah menghadirkan lembaga penjaminan untuk memenuhi agunan yang belum dimiliki oleh UMKM sebagai persyaratan kredit, yaitu PT Jamkrindo. PT Jamkrindo bertugas untuk membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank maupun non bank melalui pelunasan sementara atas kerugian nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya.

PT Jamkrindo adalah lembaga penjaminan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyukseskan kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. PT Jamkrindo bertugas untuk membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank melalui pelunasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sementara atas kerugian nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya (bankable). PT Jamkrindo memiliki 22 produk penjaminan salah satunya adalah produk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Produk penjaminan KUR pada PT Jamkrindo merupakan salah satu pendapatan utama karena berkontribusi sebesar 65% terhadap pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) perusahaan. Berdasarkan data dari Kementerian BUMN menyebutkan bahwa nilai realisasi KUR terkonsentrasi oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menguasai sekitar 94% dari plafon KUR yang disalurkan. Sepanjang tahun 2020 nilai realisasi program KUR mencapai angka Rp 188,11 T. Nilal tersebut melebihi target yang ditetapkan kementerian BUMN di angka Rp 125.5 T. Dengan realisasi KUR yang tinggi di tahun 2020, maka pada tahun 2021 arget penyaluran KUR ditingkatkan menjadi Rp 253 T. Realisasi penyasuran plafon KUR di PT Jamkrindo dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabe 1 Realisasi dan Jumlah Debitur KUR PT Jamkrindo tahun 2018-2019

PB	Tahı		
Realisasi Uraian	2018	2019	Pertumbuhan
Penyaluran	120.349	140.120	16,43%
(millar Rupiah) Jumlah Debitur	4.945.317	4.729.876	-4,6%

Sumber: Laporan Tahanan PT Jamkrindo (2019)

Pada tanggal 30 Juni 2020 terdapat/21 perusahaan penjaminan di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdiri dari 1 Perusahaan Penjaminan Pemerintah, 18 Perusahaan Penjaminan daerah, dan 2 Perusahaan Penjaminan Swasta. Pesaing utama PT Jamkrindo adalah PT Askrindo sebagai penyalur KUR terbesar. Pada awal Februari 2021, jumlah penjaminan kredit PT Askrindo mencapai Rp 110, 8 T dimana PT Jamkrindo menjamin kredit sebanyak Rp 102 T. Semakin ketatnya persaingan, mengharuskan perusahaan melakukan inovasi dan mempertahankan posisi bisnisnya. PT Jamkrindo memiliki target-target pencapaian yang disebut Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Unit (RKU) dalam menghadapi para pesaingnya. Gambaran jumlah kredit yang dijamin oleh PT Jamkrindo dan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR pada tahun 2018 serta Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) berdasarkan realisasi tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Jumlah Kredit dan IJP KUR PT Jamkrindo tahun 2018-2019

Ó			(dalam miliar)
<u> </u>	Realisasi		Pencapaian RKAP
Quraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2019
Penjaminan KUR	50.529	59.012	60.000
IJP K UR	745	1.099	1.514

Sumber: Laporan Tahunan PT Jamkrindo (2019)



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Realisasi penjaminan KUR pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 59,01 T atau mencapai 98,35% dari anggaran dalam RKAP 2019 yaitu sebesar Rp 60 T. Realisasi penjaminan KUR tahun 2019 tersebut merupakan penjaminan atas perpanjangan, restrukturisasi, suplesi kredit dan penerbitan SP KUR baru. Pada tahun 2019, PT Jamkrindo belum dapat mencapai target penjaminan KUR yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Unit (RKU) yaitu meningkatkan kualitas layanan (support) dan efektifitas monitoring terhadap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui Kantor Pusat mengenai perkembangan volume penjaminan KUR.

Salah satu indikator yang diterapkan untuk mengukur pencapaian kinerja Benjaminan KUR dengan menghitung volume market share. Volume market Mare adalah dimana jumlah nilai realisasi KUR yang dijamin oleh PT Jamkrindo dibagi total realisasi UMKMK seluruh Indonesia. Untuk menghadapi para pesaingnya, Divisi Bisnis 1 yang mempunyai produk penjaminan KUR terus melakukan pemantauan terhadap evaluasi kinerja volume penjaminan KUR yang dilakukan setiap bulan. Proses monitoring ini alakukan dalam rangka mencapai target RKAP dan RKU yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Volume *market share* PT Jamkrindo berdasarkan mitra penyalur KUR dapat dilihat pada Tabel 3.

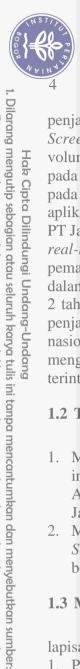
Tabel 3 Volume market share KUR PT Jamkrindo tahun 2019-2020

(dalam miliar) Volume Volume Volume Volume Bog 2019 Penjaminan Penjaminan PT Peniaminan 2020 Penjaminan Kemenko CoJamkrindof Vocatio Kemenko di PT-Jamkrindo 131.649 56.609 **BUMN** 43% 34% 256.235 87.210 BUSN 437 437 100% 1.496 673 45% BPD 2.763 1.547 56% 5.769 2.077 36% 30 30% 27 18 67% Koperasi 90 Multifinance 313 313 100% 90 100% Total 135.192 58.915 44% 263.617 90.068 46%

Sumber: Laporan DWH PT Jamkrindo (diolah)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa PT Jamkrindo belum menguasai pasar penjaminan KUR secara maksimal. Hal ini dikarenakan nilai penjaminan PT Jamkrindo masih kalah dengan pesaing-pesaingnya. Oleh karena itu, diperlukannya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap volume penjaminan KUR. Sampai saat ini, proses monitoring pada PT Jamkrindo 🖫 akukan dengan pemantauan perkembangan volume penjaminan KUR terhadap mitra penyalur KUR terbesar, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Laporan mengenai perkembangan volume penjaminan KUR penjaminan baru maupun penjaminan akibat adanya suplesi, restrukturisasi, dan perpanjangan (SPR) belum diterapkan oleh semua mitra penyalur KUR yang telah berkerjasama dengan PT Jamkrindo. Dalam pembuatan laporan internal mengenai perkembangan volume penjaminan KUR selama ini masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan permasalahan tersebut, PT Jamkrindo harus melakukan monitoring untuk semua penjaminan KUR dalam upaya memenangkan pasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penjaminan KUR. J-Screen merupakan singkatan dari Jamkrindo-Screen. J-Screen adalah sebuah solusi bagi perusahaan dalam melakukan monitoring volume penjaminan yang lebih efisien. Sumber data untuk pembuatan laporan pada aplikasi *J-Screen* sudah tersedia pada aplikasi pelaporan dan dashboard pada Integrated Corporate Performance Report (ICPR) PT Jamkrindo, vaitu aplikasi data ware house (DWH) dan penjaminan KUR online. Sampai saat ini, PT Jamkrindo belum mempunyai aplikasi monitoring penjaminan KUR secara real-time. Aplikasi J-Screen diharapkan dapat membantu melakukan pemantauan terhadap volume penjaminan KUR sebagai salah satu strategi dalam mencapai target volume market share, sesuai dengan visi PT Jamkrindo 2 tahun kedepan, yaitu "Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional". Oleh karena itu, perusahaan harus lebih responsif dalam mengevaluasi kinerja produk penjaminan agar proses bisnis lebih efisien dan terintegrasi.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut:

- 1. Merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan melakukan usaha Pengembangan Aptikasi J-Screen untuk Evaluasi Kinerja Penjaminan KUR pada PT Jamkrindo.
- 2. Menganalisis kelayakan pengembangan bisnis Pengembangan Aplikasi J-Screen untuk Evaluasi Kineria Penjaminan KUR pada PT Jamkrindo berdasarkan aspek inansial dan non finansial. College of Vocational Studies

1.3 Manfaat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa lapisan masyarakat, diantaranya:

- 1. Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai evaluasi penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan adanya aplikasi monitoring penjaminan, Penulisan tugas akhir ini menambah kemampuan penulis dalam menganalisa pengembangan ide bisnis sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penulis mampu menghasilkan ide pengembangan bisnis berupa aplikasi monitoring.
- 2. Pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau referensi untuk penelitian/penulisan selanjutnya yang berkaitan dengan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- 3. Pemerintah, sebagai salah satu indikator terlaksananya penyaluran kredit melalui program KUR untuk memberdayakan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 4. Mitra Penyalur KUR, sebagai indikator besaran jumlah kredit yang telah disalurkan kepada UMKM dan mengetahui data-data jumlah kredit yang kémungkinan akan gagal bayar atau kredit macet untuk menjaga stabilitas tingkat non performing loan (NPL).
- 5. PT Jamkrindo, sebagai acuan bagi perusahaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menguasai pangsa pasar bisnis Penjaminan KUR. Selain itu, mengetahui potensi klaim produk penjaminan KUR.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup pada penulisan ini, khususnya terkait dengan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penulis memfokuskan permasalahan terkait dengan evaluasi kinerja penjaminan KUR serta peranan aplikasi monitoring dengan aplikasi J-Screen dalam proses monitoring dan evaluasi penjaminan KUR. Penulis juga membatasi penulian ini terkait dengan peranan PT Jamkrindo dalam melaksanakan penjaminan KUR. Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

